



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR **85** TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

27. Peraturan ...

27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Lubuklinggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

BAB II

PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 4

Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp875.788.943.416,00 (delapan ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Bagian Kedua

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp115.450.966.287,00 (Seratus lima belas milyar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

Pasal 6...

Pasal 6

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp54.546.946.287,00 (Lima puluh empat milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel Rp2.705.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima juta rupiah);
- b. Pajak Restoran Rp6.664.566.287,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp2.867.380.000,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp3.915.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 14.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus juta rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet Rp255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp2.870.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp11.100.000.000,00 (Sebelas milyar seratus juta rupiah).

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.705.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp2.550.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Motel Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - c. Pajak Losmen Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Wisma Pariwisata Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Pesanggrahan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - f. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah); dan
 - g. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp6.664.566.287,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp3.404.566.287,00 (Tiga milyar empat ratus empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya Rp2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Rp270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Kantin dan Sejenisnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Warung dan Sejenisnya Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah); dan
 - f. Pajak ...

- f. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp2.867.380.000,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Tontonan Film Rp1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Pagelaran Kesenian/Musi/Tari/Busana Rp11.380.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya Rp525.000.000,00 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pajak Permainan Billiar dan Bowling Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah); dan
 - f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp3.915.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron Rp3.600.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Selebaran Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
 - e. Pajak...

- e. Pajak Reklame Berjalan Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Rp14.500.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air tanah Rp270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet Rp255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i direncanakan sebesar Rp2.870.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah);
 - b. Pajak Tanah Liat Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah); dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya Rp1.700.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

(10) Anggaran ...

- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k direncanakan sebesar Rp11.100.000.000,00 (Sebelas milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemindahan Hak Rp9.500.000.000,00 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Pemberian Hak Baru Rp1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah)
- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.529.020.000,00 (Tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.850.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.525.000.000,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp7.529.020.000,00, yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp5.210.212.000,00 (Lima milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- b. Retribusi ...

- b. Retribusi Jasa Usaha Rp1.618.808.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan tertentu Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp5.210.212.000,00 (Lima milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp963.872.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp891.340.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah); dan
 - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.618.808.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp243.808.000,00 (Dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Terminal Rp850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp1.850.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp1.850.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11...

Pasal 11

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp51.525.000.000,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
- b. Pendapatan Bunga Rp1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
- c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);
- d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- f. Pendapatan dari Pengembalian Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rp42.000.000.000,00 (Empat puluh dua milyar rupiah);
- h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Rp6.295.000.000,00 (Enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
- i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga

Pendapatan Transfer

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp760.337.977.129,00 (Tujuh ratus enam puluh milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan ...

- a. Pendapatan Tansfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Daerah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp684.265.703.000,00 (Enam ratus delapan puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil Rp103.129.227.000,00 (Seratus tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum Rp457.265.497.000,00 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan sebesar Rp 336.968.682.000,00 dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan sebesar Rp120.296.815.000,00;
 - c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Fisik Rp24.842.401.000,00 (Dua puluh empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus seribu rupiah);
 - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp99.028.578.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - e. Dana Insentif Daerah Rp0,00 (Nol rupiah).
- (2) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp76.072.274.129,00 (Tujuh puluh enam milyar tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan...

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp76.072.274.129,00 (Tujuh puluh enam milyar tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah); dan
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Rp0,00 (Nol rupiah).

Bagian Keempat
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 14

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

BAB III
BELANJA DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Belanja

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp840.788.943.416,00 (Delapan ratus empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan

Bagian Kedua
Belanja Operasional

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a direncanakan sebesar

Rp...

Rp679.667.637.667,00 (Enam ratus tujuh puluh Sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp421.781.745.462,00 (Empat ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.108.947.941,00 (Dua ratus tiga puluh enam milyar seratus delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.626.944.264,00 (Empat belas milyar enam ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Modal

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp158.561.305.749,00 (Seratus lima puluh delapan milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.538.883.880,00 (Tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.462.718.000,00 (Empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp73.615.439.869,00 (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja ...

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.944.264.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja modal modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Tidak Terduga

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp2.560.000.000,00 (Dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Bagian Kelima
Belanja Transfer

Pasal 19

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas belanja transfer.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pembiayaan

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

a. Penerimaan ...

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Bagian Ketiga
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar rupiah), yang terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp36.000.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar rupiah).

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya

Surplus...

surplus/(defisit) sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dialokasikan sekurang-kurangnya 23% (dua puluh tiga persen) dari Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan untuk masing-masing bidang.

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

7. Lampiran...

7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
9. Lampiran IX Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS Persekolah; dan 9. Lampiran IX...
10. Lampiran X Formulir Komitmen Dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 25

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal,

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,


S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 85

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115.450.966.287
4.1.01	Pajak Daerah	54.546.946.287
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.705.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.550.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.550.000.000
4.1.01.06.02	Pajak Motel	10.000.000
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	10.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	20.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	20.000.000
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	0
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	0
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	75.000.000
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	75.000.000
4.1.01.06.06	Pajak Pesanggrahan	10.000.000
4.1.01.06.06.0001	Pajak Pesanggrahan	10.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	6.664.566.287
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.404.566.287
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.404.566.287
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.700.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.700.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	270.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	270.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	65.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	65.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.867.380.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.600.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	1.600.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	11.380.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	11.380.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	525.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	525.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	6.000.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	6.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	600.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	600.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	125.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	125.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.915.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.600.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.600.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.000.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	50.000.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	50.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	50.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	14.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	900.000.000

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	900.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	900.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	270.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	270.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	270.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	255.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	255.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	255.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.870.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.100.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.100.000.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	70.000.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	70.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.700.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	8.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	8.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.100.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	9.500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	9.500.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.600.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.600.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.529.020.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.210.212.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	300.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	963.872.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	963.872.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	55.000.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	55.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.200.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	600.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	300.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	300.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	891.340.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	891.340.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	150.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	200.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.618.808.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	243.808.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	108.808.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	135.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	250.000.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	250.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	850.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	850.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	250.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	25.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	700.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	700.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.850.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.850.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.850.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.525.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	900.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.200.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.200.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.200.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	220.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	120.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	120.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	100.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	350.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	180.000.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	22.000.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	15.000.000
4.1.04.12.06.0002	Pendapatan Denda Pajak Motel	1.000.000
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	1.000.000
4.1.04.12.06.0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	1.000.000
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	3.000.000
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	1.000.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	26.000.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	3.000.000
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	3.000.000
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	3.000.000
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	15.000.000
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	51.000.000
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	30.000.000
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	15.000.000
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	2.000.000
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	2.000.000
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.000.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.000.000
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	50.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	150.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	150.000.000

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	42.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	42.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	42.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.295.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.295.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.295.000.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	130.000.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	130.000.000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	130.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	760.337.977.129
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	684.265.703.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	684.265.703.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	103.129.227.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	16.931.047.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.301.532.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	26.168.945.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	172.325.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	48.473.756.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	821.681.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.259.941.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	457.265.497.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	457.265.497.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	24.842.401.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	550.304.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.253.071.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.949.278.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	798.889.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	11.486.998.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	803.861.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	99.028.578.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	34.541.300.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.155.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	40.736.301.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.083.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	479.200.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.642.086.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	12.110.086.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	506.455.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	427.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	347.150.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.072.274.129
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	76.072.274.129
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.024.247.909
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.375.638.941
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.022.483.203
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	149.904.076
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	6.500.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	
	Jumlah Pendapatan	875.788.943.416
5	BELANJA	679.667.637.667
5.1	BELANJA OPERASI	421.781.745.462
5.1.01	Belanja Pegawai	317.385.773.303
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	231.719.599.391
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	212.328.272.715
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	19.391.326.676
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	20.786.199.364
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.413.770.904
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.372.428.460
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.051.099.968
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.051.099.968
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.482.314.512
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.482.314.512
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.000.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.206.595.693
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.206.595.693
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.000.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.789.667.464
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.789.667.464
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.000.000.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	352.933.575
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	352.933.575
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.252.517
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.764.855
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	487.662
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.103.110.819
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.103.110.819
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.000.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.280.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.080.000.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.200.000.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.600.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.400.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.200.000.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.000.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.000.000.000
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	20.100.604.821
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.800.122.637
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.800.122.637
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.000.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	300.482.184
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	300.482.184
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	48.521.584.032
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.820.000.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	210.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	375.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	151.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	235.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	830.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	49.000.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	15.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	175.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	105.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	660.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	962.111.032
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	669.900.901
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.000.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	80.000.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.018.131
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.000.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	73.692.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	32.500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	39.095.725.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	39.095.725.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.640.576.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.640.576.000

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.500.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.992.672.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.482.160.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	510.512.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.004.004.360
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	137.496.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	137.496.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.794.500
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.794.500
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	58.674.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	58.674.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.042.800
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	103.042.800
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	47.684.700
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	360.901.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	360.901.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.914.915.860
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	77.364.360
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.551.500
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.816.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.665.600.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.665.600.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	214.010.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	214.010.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	909.450.946
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	271.026
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	271.026
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.380.640
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.380.640
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	737.000.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	60.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	100.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	35.000.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	66.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	221.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	13.000.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.000.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.000.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.000.000

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	175.000.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	651.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	450.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	1.155.000.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	1.155.000.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	1.155.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	17.053.728.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	17.053.728.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	17.053.728.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.108.947.941
5.1.02.01	Belanja Barang	44.324.741.814
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.324.741.814
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	299.544.641
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	295.910.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.289.528.250
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.252.250
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	23.200.625
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	183.303.910
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	102.400.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.235.647.765
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.200.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	143.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.919.244.740
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.490.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.540.749.758
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	225.846.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.817.656.395
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.014.275.184
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.250.816.280
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	600.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	171.350.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	411.053.960
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.055.821.100
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	86.805.875
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.086.745.557
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	370.200.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.577.920.574
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.159.189.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	940.562.500
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	376.992.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	380.932.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	257.925.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	32.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	305.600.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	96.250.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	155.250.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	26.400.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	42.600.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	120.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	455.925.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	829.052.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	63.220.014.088
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	49.104.987.488
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.301.860.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.254.042.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.541.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5.900.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	19.800.000

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	43.625.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	376.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.616.955.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	112.800.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.832.875.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.012.500.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	34.400.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	275.000.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	11.400.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.911.100.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	311.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.817.150.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.480.872.500
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.770.700.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.477.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.122.150.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	12.517.500
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	40.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	23.750.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	35.025.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	355.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	15.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	294.206.788
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	728.219.500
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	118.960.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	176.786.455
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.193.599.255
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.166.664.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.900.465.500
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	28.900.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	43.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	438.908.990
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	193.055.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.931.575.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.376.075.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	247.500.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	308.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	878.384.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	15.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	59.571.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	180.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	413.155.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	8.240.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	72.500.000
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	1.000.000
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	20.418.000
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	8.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	39.500.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	51.000.000
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	10.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.151.255.100
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	64.150.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	457.255.100
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	273.450.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	88.400.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	198.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	70.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	11.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000

KOTA LUBUK LINGGAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.956.000.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	665.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	150.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.400.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.200.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	216.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	225.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	855.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	855.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.331.812.500
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	253.612.500
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.058.600.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	19.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.291.121.439
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.518.322.408
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	30.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.193.980.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	199.310.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.900.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	13.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	291.950.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	260.750.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	156.730.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	133.300.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.150.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	120.125.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	67.400.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	8.727.408
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.272.799.031
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.053.033.468
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	47.088.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	72.677.563
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	2.100.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	500.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	53.564.520.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.564.520.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.825.370.600
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.739.150.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	171.428.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	171.428.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	170.570.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	858.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.541.300.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.541.300.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.995.822.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.995.822.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.995.822.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.000.000.000
5.1.03	Belanja Bunga	7.000.000.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.000.000.000
5.1.03.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	7.000.000.000
5.1.03.03.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	14.626.944.264
5.1.05	Belanja Hibah	3.100.000.000
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.100.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.100.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	11.029.352.664
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.789.352.664
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.789.352.664
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	700.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	700.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	440.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	440.000.000
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	100.000.000
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	100.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	497.591.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	150.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	150.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	150.000.000
5.2	BELANJA MODAL	158.561.305.749
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.538.883.880
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.677.402.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.677.402.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.897.290.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	718.252.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	61.860.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	546.725.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	494.200.000
5.2.02.03.01.0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	7.700.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	486.500.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	52.525.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	52.525.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.108.040.900
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	108.050.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	108.050.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.990.990.900
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	760.033.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.383.837.900
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	672.520.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	174.600.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	9.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	45.328.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	45.328.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	45.328.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.258.254.807
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.231.353.131
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	7.231.353.131
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.026.901.676
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	10.026.901.676
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.271.721.810
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.271.721.810
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.271.721.810
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.923.269.700
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.649.545.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	738.305.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	911.240.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	273.724.700
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	273.724.700
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	52.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	52.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	52.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	396.000.003
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	396.000.003
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	196.000.000

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	200.000.003
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	10.641.660
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10.641.660
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	10.641.660
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.249.500.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.249.500.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.249.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.462.718.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	31.878.278.800
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.878.278.800
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.578.278.800
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	300.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.584.439.200
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	14.584.439.200
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	14.536.559.200
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	47.880.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.615.439.869
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	43.814.136.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	34.314.136.000
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	34.314.136.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.500.000.000
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	9.500.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	27.059.250.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.400.000.000
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	1.400.000.000
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	12.734.250.000
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	9.505.440.000
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	3.228.810.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.625.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	100.000.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	2.525.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.300.000.000
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	10.300.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.726.053.869
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.726.053.869
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.726.053.869
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	16.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	16.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	16.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.944.264.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.926.504.000
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.926.504.000
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	7.926.504.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	17.760.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	17.760.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	17.760.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.560.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.560.000.000
	Jumlah Belanja	840.788.943.416
	Total Surplus/(Defisit)	35.000.000.000
6	PEMBIAYAAN	1.000.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	1.000.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.000.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000

KOTA LUBUK LINGGAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	36.000.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	36.000.000.000
6.2.03.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	36.000.000.000
6.2.03.03.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	36.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(35.000.000.000)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Walikota Lubuk Linggau



H. S. M. PRANA PUTRA SOHE